



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal dalam Pengarusutamaan Kebudayaan Melalui Pendidikan (Studi Kasus di Kota Singkawang Tahun 2021-2023)

Novita Yuliasri Pontoh^{1*}, Nandang Alamsah Deliarnoor², Rina Hermawati³

¹Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, novita23007@mail.unpad.ac.id

²Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, nandang.alamsah@unpad.ac.id

³Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia, r.hermawati@unpad.ac.id

*Corresponding Author: novita23007@mail.unpad.ac.id

Abstract: *This study evaluates the implementation of the One School One Local Wisdom Movement (GS3KL) as an innovation in cultural mainstreaming through education in Singkawang City from 2021 to 2023. The evaluation framework is based on William N. Dunn's six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that: (a) effectiveness is evident in the initial implementation, though not yet optimal; (b) efficiency varies across schools and lacks consistency; (c) adequacy is still limited due to resource gaps; (d) equity remains an issue, with disparities in access, training, and cultural stakeholder involvement; (e) responsiveness is generally positive but uneven; and (f) the policy shows a relatively high degree of contextual accuracy. This study highlights the importance of strengthening institutional support and community engagement to enhance the sustainability of cultural education policies.*

Keywords: *Policy Evaluation, Innovation, Local Government, Cultural Education*

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan inovasi Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal (GS3KL) sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan di Kota Singkawang pada tahun 2021–2023. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria dari William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) efektivitas sudah terlihat pada tahap awal, namun belum optimal; (b) efisiensi belum merata antar sekolah; (c) kecukupan masih terbatas akibat kesenjangan sumber daya; (d) pemerataan belum terpenuhi secara adil, khususnya dalam akses, pelatihan, dan pelibatan aktor budaya; (e) responsivitas cenderung positif namun belum menyeluruh; dan (f) ketepatan kebijakan tergolong cukup tinggi secara kontekstual. Studi ini menekankan pentingnya penguatan dukungan kelembagaan dan keterlibatan masyarakat untuk menjamin keberlanjutan kebijakan pendidikan berbasis budaya.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Inovasi, Pemerintah Daerah, Pendidikan Budaya

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok etnis, agama, dan interaksi historis (Mazyra, Ridho, & Irfani, 2024; Kuipers & Yulaelawati, 2009; Hutabarat, 2023). Keragaman ini tercermin dalam tradisi dan struktur sosial (Meuleman, 2006; Schefold, 1998). Namun demikian, di era globalisasi yang semakin terhubung secara global (Petrus, 1999), Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dampak budaya asing yang semakin meluas (Fauzan, 2025; Wijaya, 2023). Budaya asing yang dibawa melalui media massa, teknologi, pariwisata, dan arus migrasi, telah memengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia.

Menyadari hal tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Kebijakan ini dianggap sebagai komitmen negara dalam menjaga eksistensi budaya nasional serta menjadi acuan dalam arah pembangunan berbasis kebudayaan (Noventari & Pratama, 2019; Rustiyanti dkk, 2021). Salah satu strategi yang ditekankan dalam kebijakan tersebut adalah pengarusutamaan kebudayaan melalui sektor pendidikan baik dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa sektor pendidikan memiliki kontribusi besar terhadap pengarusutamaan kebudayaan (Hapudin, 2019; Ghany, 2018; Adiatma, 2023), yaitu dengan menjadikannya bagian integral dari kurikulum dan praktik pendidikan yang diterapkan di seluruh Indonesia.

Di salah satu daerah, yakni Kota Singkawang, pendidikan telah diposisikan perannya dalam pengarusutamaan kebudayaan (Qalam, Hasan, & Rohman, 2024; Anwar, 2023; Walhadi, Putra, & Neli, 2025; Juniardi & Marjito, 2018). Dalam upaya mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal (GS3KL). Dasar implementasi ini juga telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Dalam dokumen tersebut, program Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal (GS3KL) dilaksanakan melalui Program Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan melestarikan budaya lokal dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum baik melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kerja sama dengan masyarakat. Kebijakan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan GS3KL dan merupakan bagian dari strategi pengarusutamaan kebudayaan oleh pemerintah daerah melalui pendidikan formal. Dengan adanya dasar hukum ini, program GS3KL bukan hanya menjadi program inovasi, tetapi telah terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam prosesnya, program GS3KL mulai disosialisasikan disekolah-sekolah pada Desember 2021 sampai dengan April 2022, dan resmi di *launching* oleh Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie di SMPN 8 Kota Singkawang. Pelaksanaan GS3KL mengenalkan 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan, antara lain: (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) situs, (5) pengetahuan tradisional, (6) teknologi tradisional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, dan (10) olahraga tradisional. Pada tingkat sekolah, program GS3KL dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan berupa bentuk kearifan lokal, strategi yang digunakan dalam mengembangkan, dan implementasi GS3KL. Terkait bentuk kearifan lokal, sekolah menentukan bentuk kearifan lokal dari 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan yang akan diedukasi dan dilestarikan di lingkungan sekolah. Pada bagian strategi pelaksanaan GS3KL, sekolah membuat tim kerja,

bekerjasama dengan komite/paguyuban/perangkat kecamatan atau kelurahan/masyarakat setempat, mempersiapkan program kerja, tenaga pengajar, dan sarana prasarana serta menyiapkan strategi pelaksanaan. Adapun pada bagian implementasi, sekolah menginventarisasi aspek potensi keunggulan sekolah dan melakukan analisis internal/eksternal sekolah.

Dalam perkembangannya, implementasi program GS3KL ini menunjukkan dinamika yang terjadi. Atas dasar itu, sebagai sebuah program pemerintah, program GS3KL perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan ke depannya. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan inovasi Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal di Kota Singkawang. Alat ukur evaluasi yang digunakan merujuk pada pendapat William N Dunn (2015) yang terdiri dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Putri & Purnamasari, 2025; Mandarlangi, Kurnia, & Alamsyah, 2024; Angeline & Sulandari, 2020; Kurniawan, Sukristyanto, & Tjahjono, 2020).

Dengan tujuan studi tersebut, hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan masing-masing indikator evaluasi pada penjelasan yang terukur. Pada indikator efektivitas, diharapkan tergambar adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai budaya lokal, peningkatan partisipasi dalam pelestarian budaya, dan pengembangan produk kreatif yang berbasis lokal. Pada indikator efisiensi, diharapkan terlihat dukungan sumber daya yang mencakup anggaran, sarana prasarana, serta tenaga pengajar termasuk pendidik maupun seniman yang diperlukan. Kemudian, pada indikator kecukupan, diharapkan terlihat adanya kecukupan alokasi sumber daya untuk mendukung pelaksanaan GS3KL. Selanjutnya, pada indikator pemerataan, diharapkan teridentifikasi bahwa program GS3KL ini dilaksanakan secara merata oleh seluruh sekolah di Kota Singkawang. Sementara itu, pada indikator responsivitas, diharapkan terlihat adanya partisipasi yang optimal dari para pihak yang terlibat. Adapun terkait indikator ketepatan, diharapkan teridentifikasi bahwa inovasi ini memang tepat dalam mendukung pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

METODE

Studi ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan memahami fenomena yang lebih luas. Dalam kasus program GS3KL, penting mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal diintegrasikan ke dalam pendidikan di sekolah-sekolah di Kota Singkawang. Oleh karena itu, penelitian ini menentukan sekolah-sekolah yang terlibat dalam program GS3KL sebagai objek studi. Studi kasus ini mengambil lokus pada beberapa sekolah menengah pertama negeri (SMPN) secara *purposive*, sehingga terpilih sebanyak 10 (sepuluh) SMPN sebagai objek studi.

Data dalam studi ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Melalui pemilihan informan secara *purposive*, wawancara dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan, Pengawas Sekolah Menengah Pertama, Kepala Sekolah Menengah Pertama, Guru, Siswa, Komite Sekolah, dan tokoh masyarakat/tokoh adat. Kemudian, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan dengan mengumpulkan beberapa catatan atau rekaman dari situasi yang diamati atau dialami peneliti terkait dengan permasalahan penelitian. Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih natural dan kontekstual. Observasi pada evaluasi ini dilakukan pada aspek efisiensi dan kecukupan, untuk mengukur bagaimana sumber daya digunakan dan apakah program tersebut memiliki cukup sumber daya untuk mendukung pencapaian dari tujuan program GS3KL. Adapun studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dokumen yang relevan seperti dokumen perencanaan, laporan kegiatan, dan hasil evaluasi baik itu berbentuk visual maupun audio. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Setelah data terkumpul, data tersebut mengalami proses reduksi yang melibatkan penyortiran, pemilihan, dan penyederhanaan, dengan mengabaikan informasi yang tidak relevan dan memberikan kode pada bagian penting. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam format terstruktur seperti tabel, matrik, diagram, atau narasi yang mengilustrasikan tema dan pola yang ditemukan. Dari data yang disajikan, hubungan, pola, dan tema utama diidentifikasi, dan kesimpulan awal diambil berdasarkan analisis tersebut. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan memeriksa kembali data asli atau mencari konfirmasi dari sumber lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program GS3KL di Kota Singkawang menjadi salah satu inovasi strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berharap melalui program GS3KL dapat memperkuat identitas kultural peserta didik sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat pelestarian nilai-nilai kearifan lokal. Bagian ini menyajikan hasil temuan lapangan berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci yang meliputi unsur pemerintah, kepala sekolah, guru, siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Data yang diperoleh telah dianalisis dan dikategorikan berdasarkan enam aspek utama dalam teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun analisis terkait aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

Pertama, aspek efektivitas. Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, efektivitas merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai hasil yang telah dirancang sejak awal. Menurut William N. Dunn (2003), efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya hasil, tetapi lebih jauh lagi mencerminkan hubungan antara tujuan kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Artinya, kebijakan akan dinilai berhasil apabila dampak yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam tahap perumusan kebijakan.

Lebih dari sekadar angka atau capaian administratif, efektivitas juga menyentuh kualitas pelaksanaan program serta perubahan sosial yang muncul sebagai akibat dari intervensi kebijakan. Dunn menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak cukup hanya dengan terselenggaranya aktivitas, melainkan juga harus dapat mengubah pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sasaran secara positif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ukuran efektivitas bersifat holistik yang mencakup proses, output, dan outcome, serta kontekstual, karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan kelembagaan tempat kebijakan dijalankan. Seperti halnya inovasi GS3KL yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebagai upaya pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan.

Gerakan Satu Sekolah Satu Kearifan Lokal (GS3KL) dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai saat ini ke seluruh jenjang pendidikan dasar. Harapannya, melalui inovasi ini dapat memberikan manfaat kepada peserta didik, berupa melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat, merefleksikan nilai-nilai budaya, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa, berkontribusi menciptakan identitas bangsa, dan melestarikan budaya bangsa. Untuk itu, aspek efektivitas dalam evaluasi GS3KL dianalisis untuk menilai sejauh mana GS3KL telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal secara optimal ke dalam pembelajaran, mendorong keterlibatan aktif seluruh warga sekolah, masyarakat, tokoh budaya, dan komunitas budaya dalam kegiatan pelestarian budaya, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang mencerminkan identitas kultural lokal secara nyata dan berkelanjutan.

Dari aspek efektivitas pelaksanaan GS3KL, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh gambaran bahwa program ini digagas dari kebutuhan untuk menjadikan sekolah sebagai ruang strategis dalam pewarisan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu,

efektivitas program ini tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan budaya yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program ini telah menyentuh kesadaran kolektif bahwa budaya lokal adalah bagian tidak terpisahkan dari jati diri peserta didik dan komunitas sekolah. Ketika guru mulai mengaitkan materi pelajaran dengan konteks budaya sekitar, ketika siswa tampil dengan percaya diri membawakan obyek-obyek pemajuan kebudayaan dalam tugas sekolah, di situlah efektivitas mulai tampak dalam bentuknya yang paling otentik.

Dalam aspek efektivitas ini, program GS3KL menunjukkan telah mulai memenuhi fungsinya sebagai sarana pewarisan budaya, terutama dalam menumbuhkan rasa memiliki, memahami, dan mempraktikkan budaya lokal sejak dini. Dengan melihat jumlah objek budaya yang diangkat dan tingkat partisipasi pelaku budaya di setiap sekolah, terlihat bahwa sebagian sekolah telah mencapai sebagian besar tujuan dari program GS3KL. Namun, masih ada ketimpangan antara sekolah satu dengan lainnya. Agar aspek efektivitas GS3KL lebih merata, perlu dilakukan penguatan kapasitas sekolah.

Kedua, aspek efisiensi. Dalam konteks evaluasi pelaksanaan program GS3KL dalam pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, dikatakan dapat memenuhi aspek efisiensi apabila sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana) yang dialokasikan untuk pelaksanaan GS3KL digunakan secara optimal dan tepat (*money follow function*). Dengan demikian, pelaksanaan GS3KL yang efisien bukan semata-mata ditentukan oleh jumlah dana atau kelengkapan fasilitas, tetapi lebih pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara sinergis dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan konsep efisiensi menurut Dunn, di mana keberhasilan kebijakan publik diukur dari kemampuannya dalam menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Efisiensi pelaksanaan GS3KL bergantung pada kemampuan sekolah mengelola tenaga, dana, dan fasilitas secara terencana dan kolaboratif. Sekolah yang berhasil mengoptimalkan sumber daya tersebut cenderung mampu menyelenggarakan kegiatan budaya yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Kesenjangan dalam ketersediaan sarana budaya antar sekolah menggambarkan belum meratanya efisiensi pelaksanaan GS3KL di tingkat lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, dibutuhkan dukungan lebih dari pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya di sekolah masih berjalan dengan tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Ada sekolah yang sudah cukup baik dalam memanfaatkan dan mengelola tenaga pendidik, dana, serta sarana prasarana. Namun, sebagian besar sekolah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan ketiga aspek tersebut secara bersamaan.

Ketiga, aspek kecukupan. Dalam kebijakan publik, kecukupan berarti tujuan yang dicapai telah dirasakan memadai dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada program GS3KL yang dirancang sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan kebudayaan oleh pemerintah daerah melalui pendidikan formal

Jika melihat sejauh mana program GS3KL ini telah mencukupi kebutuhan dasar pelestarian budaya melalui pendidikan, temuan studi menilai bahwa desain kebijakan GS3KL dirancang dengan pendekatan fleksibel, memberikan ruang bagi masing-masing sekolah untuk memilih dan mengembangkan objek kearifan lokal yang sesuai dengan karakter budaya wilayahnya. Strategi ini dimaksudkan agar program lebih kontekstual dan tidak bersifat seragam, sehingga mudah disesuaikan dengan realitas sosial-budaya sekolah. Namun program ini belum mencakup seluruh kebutuhan pelestarian budaya atau mampu menjawab seluruh kebutuhan.

Pada aspek kecukupan teridentifikasi bahwa program GS3KL belum sepenuhnya

memadai atau belum cukup dalam menjawab kebutuhan pelestarian budaya melalui pendidikan, karena beberapa alasan, yaitu: (a) Terdapat kesenjangan antar sekolah, kecukupan bukan hanya tentang keberadaan elemen kebijakan, tetapi juga distribusinya secara merata. ketidakseimbangan kesiapan antarsekolah menunjukkan bahwa kebutuhan belum terpenuhi secara menyeluruh; (b) Keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan. Sekolah yang belum mendapatkan pelatihan dan pendampingan intensif menjadi bukti bahwa kebijakan belum mencukupi kebutuhan penguatan kapasitas pelaksana (guru dan kepala sekolah); (c) Kurangnya bahan ajar dan fasilitas. Ketidakterpenuhan kebutuhan dasar ini menjadikan pelaksanaan program belum beroperasi secara optimal. Hal ini merujuk Dunn yang menyebut kecukupan juga terkait dengan input struktural dan teknis. Ketika sarana belum tersedia, maka program belum cukup layak untuk berjalan optimal; (d) Sinergi komunitas masih perlu ditingkatkan. Sebagian sekolah belum optimal melibatkan komunitas budaya dan masyarakat. Padahal, kolaborasi eksternal adalah bagian penting dalam memperkaya konten dan mendukung keberlanjutan program. Ketika dimensi partisipatif belum tergarap maksimal, maka kebutuhan strategis jangka panjang (*sustainability*) belum dipenuhi.

Keempat, aspek perataan. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria perataan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Muncul perhatian serius terhadap pentingnya pemerataan pelaksanaan GS3KL di seluruh satuan pendidikan di Kota Singkawang. Pelestarian budaya melalui pendidikan tidak akan berdampak luas apabila hanya terfokus pada sekolah-sekolah tertentu. Semua siswa, tanpa memandang lokasi dan kondisi sekolahnya, dinilai berhak untuk mendapatkan pengalaman belajar yang berakar pada budaya lokal mereka. Dalam praktiknya, masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan. Beberapa sekolah telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan berbagai kegiatan berbasis budaya yang konsisten, sementara sekolah lain masih membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Ketimpangan ini umumnya terjadi pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya, baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pendukung. Berdasarkan hal ini, prinsip pemerataan dalam implementasi GS3KL belum sepenuhnya tercapai. Artinya, meskipun semangat dan arah kebijakan sudah menunjukkan upaya inklusif, kesenjangan dalam dukungan dan pelaksanaan masih terjadi.

Lebih lanjut, komitmen dinas untuk terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada sekolah-sekolah yang tertinggal menjadi indikator bahwa upaya untuk menutup kesenjangan tersebut sedang berlangsung. Namun, perlu strategi yang lebih sistematis agar bentuk dukungan tidak hanya reaktif, melainkan juga proaktif dan terencana. Hal ini karena secara normatif, pemerataan pelaksanaan GS3KL di seluruh sekolah menjadi kunci agar manfaat pelestarian budaya dapat dirasakan secara kolektif oleh semua siswa. Namun berdasarkan kondisi lapangan yang ditemukan, pelaksanaan saat ini masih menunjukkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, agar GS3KL benar-benar menjangkau seluruh peserta didik secara adil, perlu penguatan kebijakan afirmatif, pembinaan yang berkelanjutan, serta pendistribusian dukungan yang mengutamakan prinsip keadilan akses dan kesempatan.

Perataan pelaksanaan GS3KL merupakan hal mendasar agar pelestarian budaya tidak hanya menjadi program simbolik di sekolah-sekolah tertentu, melainkan menyentuh seluruh lapisan satuan pendidikan di Kota Singkawang. Pemerintah daerah melalui bidang kebudayaan telah melakukan berbagai upaya konkret untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah baik di pusat kota maupun yang berada di daerah pinggiran memiliki akses dan peluang yang setara

dalam mengembangkan program GS3KL. Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah penyediaan data budaya yang dapat dijadikan acuan oleh sekolah, pendampingan melalui kunjungan langsung ke sekolah-sekolah pinggiran, serta inisiatif kegiatan lintas sekolah seperti festival budaya antar sekolah. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan distribusi dukungan, meskipun kepala bidang juga mengakui bahwa pemerataan implementasi masih dalam tahap progresif dan belum sepenuhnya merata.

Hal lain yang penting diperhatikan yaitu terkait komitmen internal dari sekolah, terutama dari kepala sekolah, guru, dan siswa. Dalam konteks ini, optimalisasi pelaksanaan GS3KL tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan pendampingan teknis, tetapi juga oleh motivasi dan inisiatif lokal. Sering kali, beban kurikulum reguler yang cukup padat membuat sekolah harus cermat dalam menyeimbangkan antara program nasional dan muatan lokal seperti GS3KL. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya perataan, karena tidak semua sekolah memiliki kapasitas manajerial atau sumber daya yang sama untuk mengelola program ini secara berkelanjutan.

Dalam kerangka evaluasi kebijakan publik, upaya perataan yang sedang berlangsung ini mencerminkan prinsip keadilan distribusi, yang tidak hanya dilihat dari segi akses, tetapi juga dari hasil nyata berupa kualitas pelaksanaan program di lapangan. Meski pemerintah telah menyediakan dukungan yang relatif terbuka bagi semua sekolah, keberhasilan implementasi yang setara tetap membutuhkan keterlibatan aktif dan berkelanjutan dari seluruh ekosistem sekolah.

Kelima, aspek responsivitas. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Menurut Willam N. Dunn, responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

Dunn mengemukakan bahwa kriteria responsivitas penting karena analisis yang memenuhi semua kriteria lain (efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesetaraan) tetap gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual kelompok yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

Dalam pelaksanaan program GS3KL, responsivitas menjadi dimensi evaluasi yang sangat penting, terutama dalam menilai sejauh mana kebijakan ini mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi masyarakat lokal. Berdasarkan temuan, keterlibatan aktif dari komunitas lokal khususnya orang tua, tokoh adat, dan komunitas budaya memegang peran strategis dalam mendukung keberhasilan program. Partisipasi mereka tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap kegiatan seremonial, melainkan menjadi unsur kunci dalam internalisasi nilai budaya kepada peserta didik melalui praktik langsung dalam kegiatan pembelajaran maupun non-formal.

Selain itu, pemahaman budaya siswa lebih bermakna ketika disampaikan langsung oleh tokoh adat atau komunitas budaya yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang kearifan lokal. Pendekatan kontekstual ini tidak hanya memperkaya dimensi kognitif siswa, tetapi juga membangun koneksi emosional lintas generasi yang memperkuat identitas kultural siswa. Temuan ini menunjukkan bahwa kehadiran tokoh adat dan budayawan sebagai narasumber menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran berbasis budaya, menjawab kebutuhan siswa akan pengalaman yang autentik.

Tanggapan publik terhadap GS3KL secara umum cenderung positif. Banyak orang tua menunjukkan antusiasme ketika anak-anaknya terlibat dalam kegiatan budaya. Namun

demikian, partisipasi tersebut belum merata di seluruh wilayah. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap program ini sebagai ranah eksklusif sekolah, bukan sebagai tanggung jawab bersama. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan persepsi antara pemangku kebijakan dan sebagian warga, yang bila tidak diatasi dapat menurunkan kualitas responsivitas kebijakan.

Sejalan dengan konsep responsivitas menurut Dunn yang menekankan pada kemampuan kebijakan dalam merespons kebutuhan dan preferensi masyarakat sasaran, program GS3KL masih memerlukan penguatan dari sisi komunikasi publik dan kemitraan. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun rasa memiliki masyarakat terhadap program ini. Langkah ini bertujuan agar keterlibatan masyarakat tidak bersifat insidental, tetapi tumbuh menjadi partisipasi kolektif yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dari perspektif evaluasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa tingkat responsivitas GS3KL berada pada kategori cukup adaptif, namun masih menghadapi tantangan dalam perluasan jangkauan partisipasi dan penguatan kesadaran kolektif. Upaya membangun rasa kepemilikan bersama dan mengintegrasikan suara masyarakat dalam pengembangan kebijakan budaya berbasis sekolah menjadi strategi penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan relevansi program ini di masa mendatang.

Keenam, aspek ketepatan. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dari sisi ketepatan kebijakan, strategi ini memperlihatkan bagaimana program GS3KL diarahkan untuk menyesuaikan pendekatan pendidikan budaya dengan keragaman latar belakang etnis siswa. Hal ini menunjukkan adanya kepekaan terhadap kebutuhan sasaran kebijakan serta nilai lokal yang menjadi basis pembangunan karakter. Namun demikian, tantangan tetap muncul, terutama di sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya mampu menentukan objek kearifan lokal secara kontekstual. Beberapa masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber referensi atau belum adanya sinergi dengan pelaku budaya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek ketepatan belum sepenuhnya merata dalam pelaksanaan program, sehingga diperlukan strategi pendampingan lebih lanjut dari pihak dinas agar semua sekolah dapat mengangkat materi yang benar-benar sesuai dengan latar belakang siswa.

Dilihat dari aspek ketepatan, pelaksanaan GS3KL telah menunjukkan upaya ketepatan dalam pemilihan objek budaya, terutama dengan mempertimbangkan nilai edukatif, relevansi sosial, tingkat keterlibatan siswa, serta kesesuaian perkembangan peserta didik. Meskipun belum seluruh sekolah berhasil melakukannya secara optimal, pendekatan fleksibel dan partisipatif yang diterapkan menunjukkan bahwa program ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan lokal secara tepat sasaran. Selain itu, ketepatan pemilihan objek kearifan lokal dalam pelaksanaan GS3KL telah menunjukkan arah yang kontekstual dan partisipatif, namun tetap memerlukan dukungan struktural agar seluruh sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam menerapkan program secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, studi ini menyimpulkan pada keenam aspek evaluasi yang diteliti. Pertama, pada aspek efektivitas, program GS3KL ini telah dirancang dengan tujuan yang jelas dan relevan terhadap konteks sosial-budaya Kota Singkawang. Program GS3KL tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya secara formal, melainkan juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan siswa terhadap identitas budaya lokal melalui pendekatan pendidikan yang kontekstual. Namun demikian, efektivitas program belum merata di seluruh satuan pendidikan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan implementasi yang disebabkan oleh ketiadaan pedoman teknis yang baku, keterbatasan waktu dan sumber daya guru, serta belum optimalnya pelibatan komunitas

budaya.

Kedua, pada aspek efisiensi, pelaksanaan GS3KL di Kota Singkawang menunjukkan sumber daya belum dimanfaatkan secara maksimal. Efisiensi pelaksanaan GS3KL menunjukkan bahwa efektivitas program sangat bergantung pada kemampuan satuan pendidikan dalam mengelola sumber daya secara kontekstual, partisipatif, dan lintas sektor. Meskipun tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang sama, beberapa satuan pendidikan berhasil memanfaatkan potensi internal dan eksternal secara kreatif untuk mempertahankan keberlangsungan program.

Ketiga, pada aspek kecukupan, pelaksanaan GS3KL menunjukkan bahwa program ini telah menjadi langkah awal strategis dalam upaya pelestarian budaya melalui jalur pendidikan. Meskipun berbagai sekolah telah memulai implementasi dengan semangat yang tinggi, namun dari perspektif kebijakan publik, program ini masih menunjukkan kecukupan yang parsial dan belum merata di seluruh satuan pendidikan. GS3KL belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan struktural dan substansial pendidikan berbasis budaya lokal. Beberapa hambatan yang mencolok antara lain: Ketiadaan modul dan panduan ajar tematik berbasis kearifan lokal, keterbatasan pelatihan guru secara berkelanjutan, minimnya sarana pendukung dan anggaran khusus, serta belum optimalnya keterlibatan komunitas adat secara sistematis. Meskipun GS3KL telah membangun fondasi awal yang penting, namun dalam aspek kecukupan, program ini masih berada pada tahap transisi menuju pemenuhan kebutuhan yang ideal.

Keempat, pada aspek pemerataan, pelaksanaan GS3KL di Kota Singkawang hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan prinsip pemerataan secara substansial. Meskipun secara normatif program ini dirancang sebagai upaya inklusif untuk semua satuan pendidikan, temuan di lapangan menunjukkan bahwa distribusi manfaat dan dukungan belum berlangsung secara adil, baik antar sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri.

Kelima, pada aspek responsivitas, pelaksanaan GS3KL di Kota Singkawang menunjukkan bahwa tingkat responsivitas kebijakan sudah mengarah ke arah yang positif, ditandai dengan mulai tumbuhnya keterlibatan berbagai pihak non-sekolah, seperti orang tua, komite sekolah, tokoh adat, komunitas budaya, dan masyarakat umum. Keterlibatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mulai memasuki ranah substansial seperti menjadi narasumber budaya, penyedia logistik, hingga mitra dalam praktik edukatif. Namun demikian, responsivitas program masih belum merata secara struktural dan geografis. Ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam beberapa sekolah masih bersifat simbolik dan sporadis, belum sepenuhnya menyentuh aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program secara menyeluruh.

Keenam, pada aspek ketepatan, pelaksanaan GS3KL di Kota Singkawang secara umum telah menunjukkan tingkat ketepatan kebijakan yang cukup tinggi. Ketepatan ini tercermin dari pemilihan objek budaya yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya peserta didik, kedekatan nilai-nilai budaya dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta kemampuan sekolah dalam merespons keberagaman etnis secara kontekstual.

REFERENSI

- Adiatma, T. (2023). Manajemen Pendidikan Tinggi untuk Mempromosikan Pembangunan Berkelanjutan yang Komprehensif di Masyarakat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi (JMP-DMT)*, 4(2), 182-188.
- Angeline, A., & Sulandari, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 88-109.
- Anwar, U. A. N. M. (2023). *Pengembangan Buku Suplemen IPS Sebagai Pendamping Pembelajaran Kurikulum Merdeka Siswa Kelas IV Berbasis Kearifan Lokal Kota*

- Singkawang Sekolah Dasar Negeri 15 Singkawang* (Doctoral dissertation, Universitas Tanjungpura).
- Dunn, W. N. (2015). *Public policy analysis*. Routledge.
- Fauzan, A. (2025). The Transformation of Traditional Culture in Responding to the Challenges of Globalization in Local Indonesian Communities. *The Journal of Academic Science*, 2(3), 1021-1030.
- Ghany, H. (2018). Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Madaniyah*, 8(2), 189-202.
- Hapudin, M. S. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pembangunan Budaya Sekolah (Culture School). *Journal of Teaching dan Learning Research*, 1(2), 121-130.
- Hutabarat, F. (2023). Navigating diversity: Exploring religious pluralism and social harmony in Indonesian society. *European Journal of Theology and Philosophy*, 3(6), 6-13.
- Juniardi, K., & Marjito, E. R. (2018). Urgensi Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Plural (Studi Kasus di Kota Singkawang). *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 1(2), 17-34.
- Kuipers, J. C., & Yulaelawati, E. (2009). Religion, ethnicity, and identity in Indonesian education. In *The Routledge International Companion to Multicultural Education* (pp. 449-460). Routledge.
- Kurniawan, S., Sukristyanto, A., & Tjahjono, E. (2020). Evaluation of Public Policy of National Standard Education on Elementary School in Porong Sub-district, Sidoarjo District. *Journal of Public Policy and Administration*, 4(3), 42-42.
- Mandarlangi, M. A., Kurnia, I., & Alamsyah, M. N. (2024). Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Moutong. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 548-560.
- Mazyia, T. M., Ridho, K., & Irfani, A. (2024). Religious and cultural diversity in Indonesia: Dynamics of acceptance and conflict in a multidimensional perspective. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(7), 4932-4945.
- Meuleman, J. (2006). Between unity and diversity: The construction of the Indonesian nation. *European Journal of East Asian Studies*, 5(1), 45-69.
- Noventari, W., & Pratama, A. Y. (2019). Analisis Strategi Kebudayaan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Rangka Memperkokoh Bingkai Integrasi Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 1-14.
- Petras, J. (1999). Globalization: A critical analysis. *Journal of contemporary Asia*, 29(1), 3-37.
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114-126.
- Qalam, M. N., Hasan, M., & Rohman, R. F. (2024). Implementasi Profil Pelajar Berbasis Kearifan Lokal dalam Membangun Kesadaran Multikultural di Madrasah Tsanawiyah Singkawang. *Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 14(1), 124-142.
- Rustiyanti, S., Listiani, W., Sari, F. D., & Peradantha, I. S. (2021). Ekranisasi AR PASUA PA: dari Seni Pertunjukan ke Seni Digital sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 186-196.
- Schefold, R. (1998). The domestication of culture: Nation-building and ethnic diversity in Indonesia. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde*, 154(2), 259-280.
- Walhadi, W., Putra, P., & Neli, N. (2025). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Taman Kanak-Kanak Negeri Alam Kota Singkawang. *Ar-Raihanah: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 40-51.

Wijaya, J. H. (2023). Lifestyle transformation in Indonesia: The impact of foreign cultures in the era of globalization. *Available at SSRN 4511264*.